



**REVISI IV RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2016-2021**



PAINAN, OKTOBER 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis *Pembangunan Peternakan* merupakan salah satu bagian penting dari upaya untuk menyukseskan agenda pembangunan daerah sesuai dengan amanah RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Melalui Rencana strategis ini diharapkan dapat dilaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan Renstra ini : *Pertama, Memformulasikan program dan kegiatan prioritas pembangunan peternakan; Kedua, Merumuskan kebutuhan pembiayaan (indikasi pendanaan); dan Ketiga, Menyusun mekanisme pelaksanaan pembangunan peternakan.* Pendekatan kajian dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan deduktif dengan kajian konseptual dengan menelaah RPJMD, Renstra Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator Renstra sebelumnya, dan pendekatan induktif dengan kajian teknis dan empiris di 15 kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan setiap tahunnya dapat berjalan lancar sesuai dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, Dan Sejahtera***”.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Oktober 2019

Pt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12
2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	52
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	52

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	26
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	27
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	49
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama	50
Tabel 6	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perjanjian Kinerja Tahun 2017)	52
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	72
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	64
Tabel 7	Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	69
TABEL T-C.28	Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah kabupaten yang terletak di pantai Barat bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan pintu gerbang masuk di wilayah selatan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara Administrasi, saat ini terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari pemerintah. Awalnya Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 256 desa, kemudian terdapat perubahan nama desa menjadi nagari, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 182 Nagari. Seiring dengan perubahan waktu pemerintah daerah terus melakukan perubahan jumlah dan luas wilayah nagari sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Sejarah perubahan tersebut mulai dari 182 nagari berubah menjadi 36 nagari adat kemudian berubah lagi menjadi 37 nagari adat, dan terus berubah dari nagari adat menjadi nagari pemerintah yang berjumlah 96 menjadi 102 nagari sampai akhirnya kembali menjadi 182 nagari pemerintah.

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 00''$ LS sampai $2^{\circ} 28,6' 00''$ LS dan $100^{\circ} 19' 00''$ BT sampai $101^{\circ} 18' 00''$ BT. Bagian utara berbatasan dengan Kota Padang, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko, bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 579,495 hektar yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar 279,533 hektar atau 54,39 Persen dan kawasan budidaya sebesar 299,692 hektar atau 45,61 Persen. Jumlah pulau 47 buah dan garis pantai 234,2 kilometer.

Secara geologis Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatera Fault* di

sepanjang pesisir Sumatera yang saling berdesakan sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang air laut yang tinggi atau tsunami. Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan bencana alam dan gempa bumi terjadi karena letak geografis daerah ini yang terletak pada pertemuan lempeng benua. Tanah longsor dan banjir lebih diakibatkan karena sifat fisik dan tutupan lahan seperti kawasan hutan yang semakin berkurang. Selama ini bencana alam menjadi kendala dalam upaya pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan budidaya yang dioperasionalkan melalui kawasan strategis telah dituangkan dalam RPJMD melalui visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, Dan Sejahtera***. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan industri dengan beberapa sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan pertama yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan melalui strategi mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna; dan meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan.

Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan peternakannya. Hal ini didukung dengan populasi ternak yang cukup sebagaimana data Statistik Peternakan tahun 2018 yaitu ; sapi potong 82.615 ekor, kerbau 9.353 ekor, kambing

41.264 ekor, ayam buras 792.648 ekor, ayam ras petelur 107.000 ekor, ayam ras pedaging 1.718.000 ekor dan itik 163.994 ekor.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak, Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas peternakan.

Peningkatan produksi, nilai tambah dan peningkatan daya saing produk peternakan dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan secara *holistik-tematik, integratif* dan *spasial*. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan peternakan dapat berjalan secara menyeluruh, sesuai dengan fokus pembangunan daerah, terintegrasi dengan komoditi lainya dan sesuai dengan tata ruang.

Guna menjaga arah dan kebijakan pembangunan peternakan, maka perlu disusun Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RIPD.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah;

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan pimpinan, staf dan karyawan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 .Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terbentuklah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai Dinas maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

a. Kedudukan

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pemerintah daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

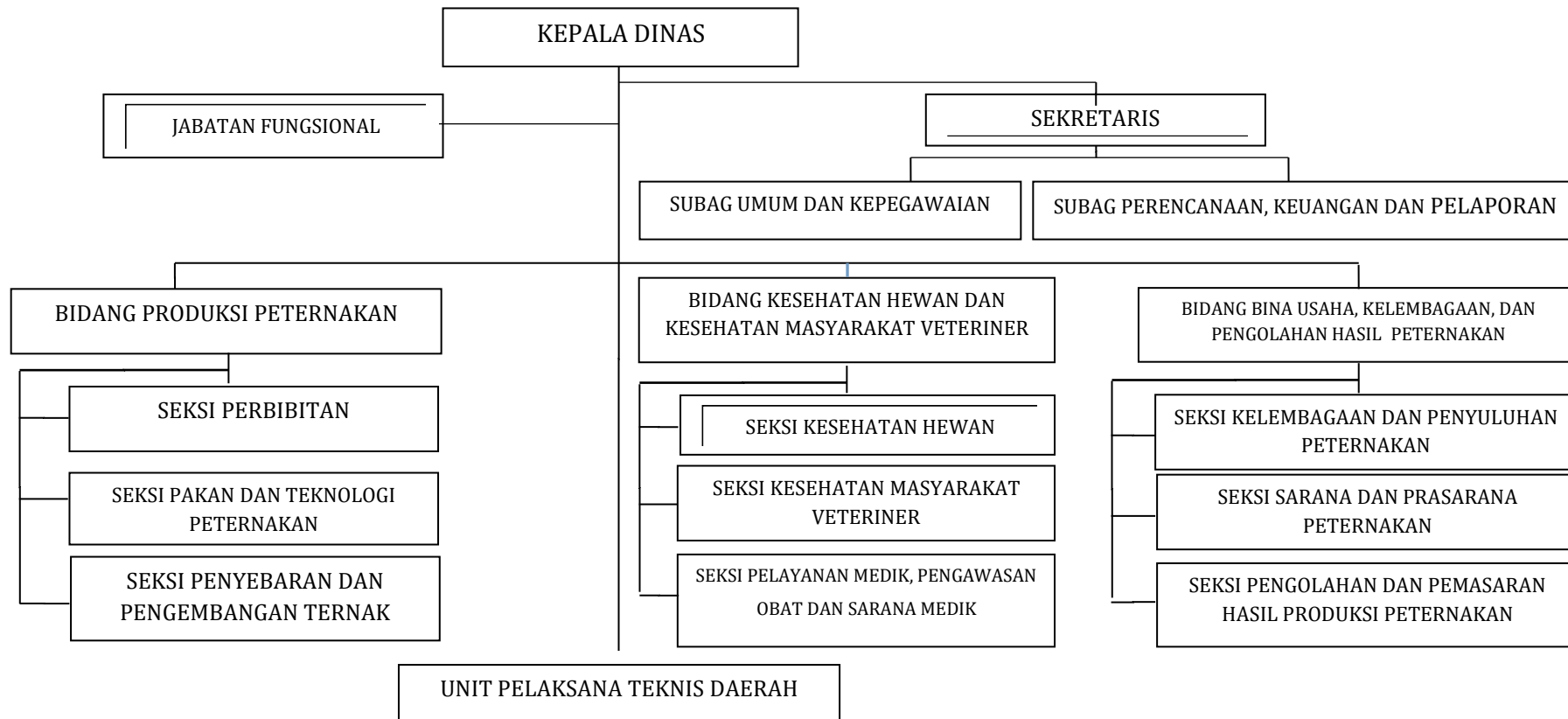
- c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan
- d) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. *Susunan Organisasi*

Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
 - b) *Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
- 3) Bidang Produksi Peternakan
 - a) *Seksi Perbibitan*
 - b) *Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan*
 - c) *Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak*
- 4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a) *Seksi Kesehatan Hewan*
 - b) *Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner*
 - c) *Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik*
- 5) Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan
 - a) *Seksi Kelembagaan dan Penyuluh Peternakan*
 - b) *Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan*
 - c) *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*
- 6) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

(sumber : Perda Kab. Pessel Nomor 8 tahun 2016)

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. *Sub Bagian umum dan kepegawaian*: mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan Dinas.
- b. *Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Pelaporan* : yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan

2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun

bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. Pengawasan pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. **Seksi Kesehatan Hewan; mempunyai tugas** pokok melakukan perumusan kebijakan teknis penyiapan bahan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan
- b. **Seksi Kesehatan masyarakat veteriner** ; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- c. **Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan, dan Sarana Medik;** mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan medik, pengawasan obat dan Sarana Medik Hewan.

3. **Bidang Produksi Peternakan**

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak

Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :

- a. **Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pakan dan Teknologi Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pakan dan Teknologi Peternakan
- b. **Seksi Perbibitan;** mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang produksi peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan ternak
- c. **Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak

4. **Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan**

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang budi daya, produksi, sarana prasarana peternakan, pakan, teknologi,

penyuluhan peternakan, bina usaha, serta pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi di bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- d. Pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan Pembagian pelaksanaan tugas bidang peternakan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan terdiri dari :

- a. **Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan.
- b. **Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- c. **Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;** mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana Prasarana Peternakan.

5. Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Sumber Daya Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Aparatur Sipil Negara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 28 orang PNS (Tenaga Administrasi) dan 24 orang PNS yang bertugas sebagai tenaga teknis lapangan (ditempatkan di Kecamatan), serta 25 orang tenaga honor/sukarela dengan klasifikasi;

1) Berdasarkan golongan ruang

- a) Golongan IV : 5 orang
- b) Golongan III : 33 orang
- c) Golongan II : 5 orang
- d) Honorer (setara gol II) : 24 orang

2) Berdasarkan pendidikan

- a) Pasca Sarjana : 4 orang
- b) Dokter Hewan : 6 orang
- c) Sarjana peternakan : 29 orang
- d) Sarjana lainnya : 8 orang
- e) D3 : 4 orang
- f) SLTA : 16 orang

3) Berdasarkan jabatan

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III A : 1 orang

- c) Eselon III B : 3 orang
- d) Eselon IVA : 11 orang
- e) Medis lapangan : 3 orang
- f) Paramedis : 16 orang
- g) Inseminator : 18 orang
- h) Tenaga administrasi : 23 orang
- i) Tenaga kebersihan : 2 orang
- j) Penjaga kantor/malam : 1 orang
- k) Sopir : 2 orang
- l) Satpam : 1 orang

b. Rumah Tangga Pemelihara (RTP) Ternak

Jumlah RTP peternak di Kabupaten Pesisir Selatan adalah RTP ternak sapi potong 35.952 KK, RTP ternak kerbau 2.900 KK, RTP ternak kambing 6.492 KK, RTP ternak ayam buras 52.663 KK, RTP ternak ayam ras petelur 30 KK, RTP ternak ayam ras pedaging 184 KK, RTP dan ternak itik 5.037 KK

c. Kelembagaan Peternak

Kelembagaan peternak di Pesisir Selatan terdiri dari kelompok tani ternak. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 501/560/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan kelompok tani di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 499 kelompok tani ternak dengan klasifikasi sebagai berikut; kelompok pemula 150 kelompok, kelompok lanjut 169 kelompok, kelompok madya 175 kelompok dan kelompok utama 5 kelompok. Disamping itu terdapat 50 kelompok inti plasma Farm Kemitraan ayam potong.

2. Sarana Prasarana Penunjang

- a. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdiri dari 6 Unit (Puskeswan Tarusan, Puskeswan Painan, Puskeswan Sutera, Puskeswan Padang Laban, Puskeswan Inderapura dan Puskeswan Lunang);
- b. Rumah Potong Hewan (RPH Painan), 1 unit ;

- c. Pos IB sebanyak 20 unit, terdiri dari 1 unit Pos IB di Kec. Koto XI Tarusan, 2 unit di Kec. Bayang, 1 unit di Kec. IV Nagari Bayang Utara 4 unit di Kec. IV Jurai, 1 unit di Kec. Batang Kapas, 2 unit di Kec. Sutera 2 unit di Kec. Lengayang, 2 unit di Kec. Ranah Pesisir, 2 unit di Kec. Linggosari Baganti, 2 unit di Kec. Pancung Soal, dan 1 unit di Kec. Lunang dan Silaut;
- d. Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4), terdiri dari 2 unit (P4 Lengayang seluas 10 Ha dan P4 Air Haji seluas 5 Ha);
- e. Pasar Ternak 1 unit yaitu Pasar Ternak Lengayang;
- f. Alat mesin peternakan, terdiri dari adalah Chopper 7 unit, Alat USG 2 unit, biogas 5 unit, GPS 4 unit, pengukur suhu 1 unit;
- g. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 13 unit tersebar di seluruh Kecamatan.

3. Keadaan Sumber Daya lainnya

- a. Teknologi reproduksi aplikatif berupa Inseminasi Buatan (IB) di bidang peternakan
- b. Teknologi pengolahan limbah peternakan (bio gas dan pupuk organik) sebagai teknologi aplikatif untuk pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi dan pupuk organik.

Untuk pengembangan Sumber daya peternakan ini dibutuhkan adanya anggaran.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dinilai dari dua aspek yaitu : Kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi, perdagangan peternakan dan kesehatan hewan, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Selain kinerja aspek ekonomi, pelayanan peternakan dan kesehatan hewan juga dapat dinilai dari kinerja aspek

teknis yang meliputi populasi, produksi, dan konsumsi produk asal hewan.

2. Kinerja Makroekonomi

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain.

Pembangunan peternakan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat petani ternak. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna, peningkatan produksi ternak, peningkatan sumber daya masyarakat peternak, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi mendukung usaha peternakan, serta penataan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan.

Keberhasilan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama penggerak pembangunan peternakan yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam (lahan dan ternak), teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor penggerak pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara sinergis dan terintegratif, secara menyeluruh (holistik), secara tematik, dan mempertimbangan tata ruang (spasial) untuk mencapai pembangunan peternakan yang berkualitas, peningkatan produksi peternakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Kinerja Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan di Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi :

- a. Pelayanan inseminasi buatan; merupakan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas bibit ternak terutama ternak sapi dan kerbau. Dengan teknologi ini diharapkan produktifitas ternak dapat meningkat dimana dengan ternak lokal

berat hidup ternak sapi siap potong hanya mencapai paling tinggi 350 kg, sedangkan ternak hasil inseminasi buatan berat badannya dapat mencapai 600 kg sampai dengan 800 Kg. Realisasi pelayanan Inseminasi Buatan pada tahun 2018 mencapai 10.769 ekor

- b. Pemeriksaan Kebuntingan; merupakan pelayanan lanjutan dari Inseminasi Buatan dimana ternak yang telah di lakukan Inseminasi Buatan minimal 2 bulan perlu dilaksanakan Pemeriksaan kebuntingan (PKB) untuk mengetahui ternak tersebut sudah bunting atau belum. Dengan demikian peternak segera tahu dan yakin bahwa ternak yang dipelihara sudah bunting atau belum. Pada tahun 2018 jumlah ternak yang di PKB adalah 8.543 ekor.
- c. Pelayanan kesehatan hewan; merupakan pelayanan medik maupun paramedik veteriner baik yang dilakukan oleh Dokter Hewan di Pos Kesehatan hewan maupun oleh Petugas teknis peternakan yang ada di Kecamatan. Pelayanan ini bersifat aktif maupun pasif, dimana untuk pelayanan aktif petugas memberikan pelayanan percontohan sedangkan yang pasif sesuai dengan permintaan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pada tahun 2018 jumlah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 512.703 ekor.
- d. Penanganan gangguan reproduksi; merupakan masalah yang cukup penting untuk diatasi karena bila ternak mengalami gangguan reproduksi akan sulit untuk bunting dan melahirkan anak, keadaan ini akan menurunkan jumlah kelahiran ternak yang pada gilirannya juga akan menurunkan produktifitas ternak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan reproduksi antara lain karena pemberian pakan yang kurang berkualitas maupun karena perawatan pasca melahirkan yang tidak baik. Kesadaran peternak untuk memeriksakan ternaknya yang mengalami kesulitan bunting ini masih rendah, peternak cenderung menjual ternaknya bila dikawinkan beberapa kali tidak segera bunting. Oleh sebab itu pelayanan ini cenderung

bersifat aktif dimana petugas harus sering memberikan percontohan untuk menangani gangguan reproduksi. Pada tahun 2018 jumlah penanganan gangguan reproduksi sebanyak 813 ekor.

- e. Pelayanan Rumah Potong Hewan; Pemotongan hewan/ ternak merupakan kegiatan yang harus dikontrol dan diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan karena proses pemotongan hewan berpotensi menularkan penyakit yang bersifat Zoonosis (menular dari ternak ke manusia), disamping itu juga agar dapat tersedia daging yang higienis dan berkualitas baik. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 1(satu) unit rumah potong hewan (RPH) yang melayani pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan daging di kota Painan. Regulasi yang mengatur retribusi RPH adalah Perda No. 2 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha. Jumlah pemotongan ternak tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6.026 ekor.
- f. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); Pelayanan penerbitan SKKH dilakukan oleh tenaga medis veteriner (drh), dengan tujuan untuk menjamin kepastian Kesehatan Hewan dan produk asal hewan yang masuk dan keluar dari dan ke Pesisir Selatan. Pelayanan dilakukan dengan melakukan pengecekan surat kesehatan hewan dari petugas peternakan/dokter hewan dan petugas cek point. Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menyelenggarakan 2 cek poin yaitu Siguntur dan Silaut. Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan dari Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- 1) Ternak sapi : 131 SKKH
 - 2) Ternak Ayam : 204 SKKH
 - 3) Ternak kerbau : 9 SKKH
 - 4) Telur : 17.500 Kg dengan 5 SKKH
 - 5) Daging babi : 21 SKKH
 - 6) Burung : 22 SKKH
 - 7) Anjing : 3 SKKH

Secara umum gambaran Kinerja Pelayanan Peternakan yang dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	REALISASI
1	Inseminasi Buatan	10.769 ekor
2	Pemeriksaan Kebuntingan	8.543 ekor
3	Pelayanan Kesehatan Hewan	512.703 ekor
4	Penanganan Gangguan Reproduksi (ATR)	813 ekor
5	Pemotongan Hewan	6.026 ekor
6	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	
	Ternak sapi	131 SKKH
	Ternak ayam	204 SKKH
	Ternak kerbau	9 SKKH
	Telur	5 SKKH
	Daging babi	21 SKKH
	Burung	22 SKKH
	Anjing	3 SKKH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Hewan dapat dilihat pada Tabel T.C-23 dan T.C-24 dibawah ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Populasi ternak (ekor)																		
	- sapi potong				77,847	78,314	79,098	79,572	80,050	77,383	78,998	79,196	79,705	80,146	99.40	100.87	100.12	100.17	100.12
	- Kerbau				8,051	8,083	8,116	8,148	8,181	8,019	8,031	8,118	8,204	8,271	99.60	99.36	100.02	100.69	101.10
	- Kambing				50,057	50,107	50,157	50,207	50,258	50,007	50,048	44,355	44,362	41,699	99.90	99.88	88.43	88.36	82.97
	- Ayam buras				763,329	768,672	774,053	779,472	784,928	758,023	763,769	778,167	779,112	779,819	99.30	99.36	100.53	99.95	99.35
	- Ayam ras petelur				62,000	65,725	69,668	73,849	78,280	58,495	63,625	74,938	94,540	85,300	94.35	96.80	107.56	128.02	108.97
	- Ayam ras pedaging				190,261	197,871	205,786	214,017	222,578	182,943	206,800	208,100	261,600	552,500	96.15	104.51	101.12	122.23	248.23
	- Itik				142,686	143,399	144,116	145,557	147,013	141,408	141,976	144,570	147,499	147,921	99.10	99.01	100.32	101.33	100.62
2	Produksi Daging (kg)																		
	- sapi potong				1,038,026	1,069,167	1,079,858	1,112,254	1,145,622	1,007,792	1,091,775	1,095,600	1,171,001	1,145,622	97.087	102.115	101.458	105.282	100.000
	- Kambing				39,163	39,281	39,398	39,517	39,635	34,011	36,386	37,944	39,878	39,428	86.845	92.630	96.309	100.914	99.478
	- Kerbau				35,031	36,082	37,165	38,280	39,428	39,046	42,082	45,119	47,291	39,635	111.461	116.629	121.402	123.540	100.525
	- Ayam buras				821,110	829,321	837,614	845,990	854,450	812,980	819,143	834,584	835,598	836,356	99.010	98.773	99.638	98.772	97.882
	- Ayam ras petelur				45,235	45,235	45,235	45,235	45,235	24,129	26,245	30,912	38,998	41,294	53.341	58.019	68.336	86.212	91.287
	- Ayam ras pedaging				150,793	155,317	159,976	166,375	173,030	146,400	165,490	166,532	209,345	173,030	97.087	106.550	104.098	125.827	100.000
	- Itik				58,622	58,915	59,209	59,505	59,803	58,330	58,566	59,635	60,843	59,803	99.502	99.408	100.719	102.249	100.000
3	Produksi telur (kg)																		
	- Ayam buras				487,576	490,989	494,426	497,888	501,373	318,369	320,783	326,830	327,227	328,143	65.296	65.334	66.103	65.723	65.449
	- Ayam ras petelur				390,629	410,161	430,669	456,509	483,900	372,028	404,655	476,605	601,274	483,900	95.238	98.658	110.666	131.711	100.000
	- itik				664,163	684,087	704,610	725,748	747,521	647,410	647,410	659,239	672,595	644,818	97.478	94.639	93.561	92.676	86.261
	Konsumsi Daging																		
	Daging Sapi				828,345	853,195	861,727	887,579	914,206	871,237	871,237	874,289	934,459	936,510	105.18	102.11	101.46	105.28	102.44
	Daging Kerbau				26,624	27,422	28,245	29,093	29,965	29,674	31,982	34,290	35,941	35,115	111.46	116.63	121.40	123.54	117.19
	Daging Kambing				29,764	29,764	29,764	29,764	29,764	25,848	27,652	28,837	30,307	30,455	86.84	92.90	96.89	101.82	102.32
	Daging Ayam Buras				482,238	482,238	482,238	482,238	482,238	477,462	481,082	490,151	490,746	491,192	99.01	99.76	101.64	101.76	101.86
	Daging Ayam Ras Pedaging				34,429	88,561	88,561	88,561	88,561	85,980	97,194	97,804	122,949	259,668	97.09	109.75	110.44	138.83	293.21
	Daging Ayam Ras Petelur				26,567	26,567	26,567	26,567	26,567	14,171	15,415	18,155	22,903	20,665	53.34	58.02	68.34	86.21	77.79
	Daging Itik				35,437	35,437	35,437	35,437	35,437	35,264	35,405	36,052	36,783	36,888	99.51	99.91	101.74	103.80	104.09
	Konsumsi Telur																		
	Telur Ayam Ras				195,315	195,315	195,315	195,315	195,315	186,014	202,327	238,302	300,637	321,580	95.24	103.59	122.01	153.92	164.65
	Telur Ayam Buras				477,825	477,825	477,825	477,825	477,825	312,002	314,367	320,293	320,682	321,580	65.30	65.79	67.03	67.11	67.30
	Telur Itik				464,914	464,914	464,914	464,914	464,914	451,374	453,187	461,467	470,817	444,280	97.09	97.48	99.26	101.27	95.56

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
BELANJA DAERAH	16,789,581,365	21,579,297,368	26,882,999,952	33,414,561,007	7,540,773,973	16,573,271,836	21,036,655,016	25,722,487,635	31,742,250,830	7,327,810,455	99%	97%	96%	95%	97,17%	19,049,059,733	17,665,150,689
Belanja Tidak Langsung	5,043,393,955	5,035,294,768	5,824,032	5,655,264,864	2,932,310,423	5,022,053,518	4,944,818,778	4,989,762,183	5,311,243,550	2,879,950,345	100%	98%	86%	94%	98,21%	3,664,443,942	3,108,457,934
Belanja pegawai	5,043,393,955	5,035,294,768	5,824,032	5,655,264,864	2,932,310,423	5,022,053,518	4,944,818,778	4,989,762,183	5,311,243,550	2,879,950,345	100%	98%	86%	94%	98,21%	3,664,443,942	3,108,457,934
Belanja langsung	11,746,187,410	16,544,002,600	21,059,916,920	27,759,296,143	4,608,463,550	11,554,798,218	16,091,836,240	20,732,725,452	26,431,006,680	4,447,860,110	98,37%	97,27%	98,45%	95,21%	97,50%	14,415,072,624	13,984,738,833
Belanja pegawai	122,075,000	204,925,000	1,251,835,400	971,533,800	287,354,000	103,475,000	192,475,000	1,177,382,400	941,355,800	282,404,000	84,76%	93,92%	94,05%	96,89%	98,28%	472,953,867	513,348,700
Belanja Barang dan Jasa	11,394,930,410	14,238,562,600	17,937,761,274	24,785,850,143	2,992,315,250	11,218,563,118	14,113,560,238	17,730,967,202	23,628,326,580	2,850,291,110	98,45%	99,12%	98,85%	95,33%	95,25%	11,891,569,946	12,143,804,616
Belanja Modal	229,182,000	2,100,515,000	1,870,320,246	2,001,912,200	1,328,794,300	229,180,200	1,785,801,000	1,824,375,850	1,861,324,900	1,315,165,000	100%	85,02%	97,54%	92,98%	98,97%	1,255,120,624	1,326,988,967
Total	16,789,581,365	21,579,297,368	26,882,999,952	33,414,561,007	7,540,773,973	16,573,271,836	21,036,655,016	25,722,487,635	31,742,250,830	7,327,810,455						17,701,202,278	17,067,079,295

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Tantangan

- a. Konsumsi produk hewan meningkat;
- b. Keunggulan kompetitif masih rendah
- c. harga sarana prasarana produksi peternakan masih tinggi;
- d. Peningkatan risiko penyakit hewan strategis dan zoonosis;
- e. Persaingan kompetensi tenaga peternakan dan kesehatan hewan dalam penguasaan teknologi terbaru;
- f. Kualitas SDM rendah;
- g. Kualitas pelayanan veteriner (Veterinary Services) rendah;
- h. Masalah Otonomi Daerah (adanya kesenjangan kelembagaan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pusat dan Daerah).

2. Peluang

- a. Kerjasama regional segitiga pertumbuhan (IMS – GT dan IMT–GT) yang melibatkan Sumatera Barat sangat berpotensi kerjasama (MOU) di sub sektor peternakan baik dalam bentuk investasi maupun pemasaran produksi peternakan.
- b. Pertambahan penduduk yang semakin besar akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan, khususnya hewani.
- c. Semakin tingginya sumberdaya manusia masyarakat melalui jalur pendidikan formal khususnya ilmu peternakan akan membuka peluang untuk mengembangkan subsektor peternakan.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan sumber protein hewani yang ASUH
- e. Daya tarik masyarakat untuk melakukan usaha peternakan yang berpotensi memberikan penghasilan lebih sekaligus membuka peluang kerja
- f. Permintaan terhadap sapi qurban yang meningkat setiap tahun

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESSIR SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dihadapkan pada berbagai permasalahan:

1. Bidang Sumber Daya Manusia

a. Keterbatasan jumlah tenaga teknis peternakan. Dalam pelayanan peternakan dibutuhkan ketersediaan tenaga teknis peternakan sebagai pelayan teknis dan agen pembaruan informasi dan aplikasi teknologi dalam pembangunan peternakan. Kondisi SDM teknis yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini adalah;

- 1) Tenaga medis sebanyak 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Secara teknis, kebutuhan tenaga medis untuk mengelola 6 (enam) unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 15 orang diluar yang menduduki jabatan struktural.
- 2) Paramedis veteriner, 22 orang sebagian besar masih merangkap sebagai inseminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKB), dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
- 3) Tenaga labor kesehatan hewan, sampai saat ini belum ada
- 4) Tenaga labor kesehatan masyarakat veteriner, sampai saat ini belum ada.
- 5) Juru Keswan, belum ada
- 6) vaksinator, 21 orang yang sekaligus bertindak sebagai tenaga paramedis veteriner.
- 7) *Keur Master* pemotongan ternak, 3 orang.
- 8) Pengawas mutu pakan, (belum ada)
- 9) Pengawas mutu bibit, (belum ada)

- 10) Inseminator, ada 25 orang petugas yang terdiri dari 23 orang sudah memiliki Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIMI), 17 orang diantaranya inseminator aktif dan 5 orang tidak aktif. Dari 5 orang inseminator yang tidak aktif, 3 orang sebagai pejabat struktural, 2 orang di kecamatan, idealnya dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan inseminator sebanyak 35 orang.
- 11) Pemeriksa kebuntingan (PKB), ada 11 orang (2 orang merangkap struktural). Idealnya satu Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang PKB
- 12) Asisten teknis reproduksi (ATR), ada 3 orang. Idealnya Idealnya dua Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang ATR. 1 orang ATR mengawasi kinerja 2 orang PKB.
- 13) *Sterility control* (SC), ada 5 orang. Idealnya setiap puskseswan harus dilengkapi oleh 1 orang petugas SC.
- 14) *Recorder* IB, 1 orang
- 15) *Handling* semen beku, 1 orang
- 16) Penyuluh peternakan lapangan, tidak tersedianya penyuluh peternakan yang memadai dan sesuai kebutuhan lapangan.

b. Masih rendahnya mutu SDM Petugas Peternakan

c. Masih terbatasnya kualitas SDM Peternak.

2. Bidang Sumber Daya Alam (Lahan dan Komoditas Ternak)

a. lahan; permasalahan sumberdaya lahan peternakan di Pesisir Selatan adalah:

- 1) belum adanya lahan khusus yang diperuntukkan sebagai lahan usaha peternakan baik sebagai lahan penggembalaan umum, lahan untuk hijauan pakan ternak (HPT) dan lahan untuk perkandangan.
- 2) lahan untuk pengembangan usaha peternakan pada umumnya merupakan lahan marginal dan kurang produktif.

- 3) belum adanya lahan khusus untuk usaha peternakan. Akibatnya ketersediaan pakan sangat tidak mencukupi akibat mengandalkan pakan alami.
- b. Sumber daya genetik hewan; Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal dan belum mendapatkan perhatian secara serius sebagai komoditas unggulan daerah.
 - c. Benih dan bibit ternak; sebagian besar benih atau bibit ternak didatangkan dari luar daerah, sehingga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Daerah belum menyediakan pusat perbibitan yang dikelola dengan manajemen perbibitan (*good breeding practice*). Perbibitan yang ada masih dikelola dengan manajemen tradisional akibatnya belum mampu menyediakan ketersediaan bibit unggul (baik bibit sapi Pesisir maupun itik Bayang).
 - d. Pakan unggas dan pakan hijauan; Pakan unggas yang banyak digunakan oleh masyarakat masih merupakan sumber pakan alami (dedak, bekicot, dan lainnya). Peternak belum sepenuhnya menggunakan pakan unggas yang memenuhi kadar nutrisi unggas sebagaimana standar pakan unggas. Sementara itu, sebagian besar pakan ternak sapi potong merupakan pakan hijauan yang berasal dari rumput alam yang secara teknis memiliki kandungan nutrisi dan palabilitas yang lebih rendah dibandingkan pakan HMT unggul.
 - e. Sumber daya air, pemenuhan kebutuhan air bersih masih disediakan secara tradisional dan belum tersedia setiap saat.

3. Teknologi Peternakan

- a. Inseminasi buatan telah diimplementasikan namun belum berhasil secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam deteksi birahi dan akibat ternak belum dipelihara secara intensif.
- b. Teknologi pengolahan pakan ternak masih sangat sedikit diaplikasikan oleh masyarakat.
- c. Teknologi pengolah limbah peternakan menjadi pupuk organik dan bio gas belum dimanfaatkan secara optimal

- d. Teknologi pengolah produk peternakan (daging dan telur) masih bersifat tradisional.

4. Kelembagaan Peternakan

- a. Kelembagaan Teknis Peternakan belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga teknis peternakan, keterbatasan prasarana dan sarana, dan belum operasionalnya kelembagaan peternakan dilapangan akibat belum dikukuhkannya Puskesmas, Pusat Perbibitan, Pasar Ternak dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebagai UPTD Peternakan.
- b. Kondisi usaha peternakan; Usaha peternakan sebagian besar merupakan usaha tradisional dan merupakan usaha sampingan
- c. Kawasan Usaha Peternakan; Pesisir Selatan belum mengoptimalkan peran kawasan usaha peternakan dalam pemberdayaan peternak. Pemberdayaan peternak memerlukan adanya kawasan usaha peternakan untuk menjamin kepastian usaha budidaya ternak. Kawasan usaha peternakan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - 1) bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk hewan;
 - 2) tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
 - 3) tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, dan/atau embung; dan
 - 4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan usaha peternakan dapat berupa kawasan agropolitan, kawasan perdesaan berbasis peternakan, kawasan integrasi ternak dengan komoditas lainnya, kawasan perbibitan itik, kawasan sapi potong, kawasan kerbau maupun kawasan sentra produksi ternak.

Peruntukan penggunaan kawasan peternakan adalah sebagai berikut :

- 1) lahan penggembalaan umum;
- 2) kegiatan usaha budidaya ternak;
- 3) penghasil tumbuhan pakan;

- 4) tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
- 5) tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
- 6) tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”***, maka ada tiga kata kunci yang menjadi fokus bahasan dalam pembangunan peternakan di masa mendatang, yaitu ;

1. Mandiri
2. Unggul
3. Sejahtera

Sementara itu, ada dua misi yang menjadi landasan dalam implementasi pembangunan peternakan, yaitu misi kedua dan misi keempat sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan misi RPJMD diatas, dari tiga tujuan misi tersebut, seluruh tujuan misi terkait langsung dengan pembangunan peternakan, yaitu :

- a. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis

Sesuai amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2016, bahwa dalam mendorong pertumbuhan di desa dibuat mekanisme pembangunan kawasan perdesaan atau biasa disebut dengan istilah membangun desa. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kerjasama antar desa bisa membuat sebuah program pembangunan yang saling mensinergikan antar pihak agar terjadi percepatan desa membangun. Percepatan pembangunan ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sehingga menjadi penting agar

pembangunan berbasis kawasan perdesaan dapat menggabungkan pendekatan pembangunan dari level atas yaitu program-program pembangunan dari pusat atau daerah tanpa mengindahkan inisiatif dari level bawah yaitu partisipasi masyarakat untuk mengusulkan dan merancang pembangunan di kawasannya sendiri.

Prioritas Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui prioritas tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbangunnya infrastruktur publik; adanya akses air bersih dan sanitasi; munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan

Melalui pembangunan kawasan perdesaan agropolitan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah telah menentukan tujuan dan sasaran pembangunan kawasan melalui RPJMD, yaitu mengembangkan kawasan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti menjadi suatu kawasan terintegrasi sebagai pusat budidaya sapi potong dan pertanian terpadu, pengembangan teknologi dan pemasaran produk olahan sapi dan pengembangan daerah agribisnis terpadu; menyiapkan infrastruktur dasar dan pelayanan secara optimal melalui beberapa fungsi dan kelembagaan; dan mengintegrasikan sumber-sumber pembiayaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam mengembangkan budidaya sapi potong yang terintegrasi; meningkatkan nilai tambah produk unggulan kawasan; dan mengembangkan kemampuan pengembangan penguasaan teknologi kepada masyarakat dalam usaha dan pengolahan hasil peternakan.

Berdasarkan analisis yang bertumpu pada peluang pertumbuhan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait langsung dengan pembangunan peternakan adalah:

- (1) Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan; dan
- (2) Kawasan Sentra Perdesaan berbasis Sapi Potong

Khusus Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan, secara administratif berada pada empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Komoditi yang menjadi unggulan di empat wilayah tersebut adalah sapi potong. Upaya pemerintah sebagai langkah awal dalam mengembangkan kawasan agropolitan peternakan adalah dengan melengkapi beberapa sarana dan prasarana seperti pusat pembibitan ternak, gedung pelatihan peternak, pusat kesehatan hewan, pasar peternakan, dan sarana pendukung lainnya.

- b. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis kebencanaan.

Secara geologis Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir Sumatera yang saling berdesakan sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang air laut yang tinggi atau tsunami. Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan bencana alam dan gempa bumi terjadi karena letak geografis daerah ini yang terletak pada pertemuan lempeng benua. Tanah longsor dan banjir lebih diakibatkan karena sifat fisik dan tutupan lahan seperti kawasan hutan yang semakin berkurang. Selama ini bencana alam menjadi kendala dalam upaya pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah secara terpadu dan konsisten

Keterkaitan perencanaan ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya agropolitan peternakan sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten yang merupakan turunan dari RTRW Nasional dan Provinsi. Hal ini juga sudah diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten, dimana salah satu point prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah

pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Prioritas Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui prioritas tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbangunnya infrastruktur publik; adanya akses air bersih dan sanitasi; munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan.

2. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini adalah;

- a. Penguatan agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup mesin, peralatan pertanian, pupuk, bibit dan lain-lain;
- b. Pengembangan usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- c. Penguatan agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor;
- d. Penguatan jasa-jasa penunjang dalam bentuk perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah; dan
- e. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

Berdasarkan misi tersebut, maka ada dua tujuan yang sangat terkait dengan pembangunan peternakan, yaitu;

- a. Mengembangkan Pertanian/Perkebunan/Peternakan serta Kelautan dan Perikanan yang produktif dan bernilai tinggi.
Sesuai dengan tujuan misi ini, maka pembangunan peternakan difokuskan pada upaya untuk mengembangkan peternakan yang produktif dan bernilai tinggi.
- b. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing, terutama untuk pengolahan hasil

pertanian/perkebunan/perternakan serta perikanan dan kelautan.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan mengembangkan daya saing pengolahan hasil peternakan antara lain:

- 1) Revitalisasi kelembagaan usaha peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk;
- 2) Pembangunan sentra pengolahan hasil peternakan;
- 3) Revitalisasi pasar ternak;
- 4) Revitalisasi Tempat pemotongan hewan
- 5) Penyediaan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal
- 6) Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM; dan
- 7) Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha peternakan.

Peningkatan daya saing peternakan dapat juga dilakukan dengan Pemberian kemudahan kepada Peternak, dalam hal;

- 1) pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- 2) pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
- 3) penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- 4) pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- 5) penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
- 6) pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
- 7) pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan Usaha Peternakan;
- 8) pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- 9) perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

Sementara berdasarkan program dalam RPJMD Tahun 2016-2021, program daerah yang menjadi landasan bagi program pembangunan peternakan adalah;

- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- d. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- f. Program Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Peternakan
- g. Program Peningkatan Agribisnis Peternakan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

1. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah *“Terwujudnya system pertanian bio-industri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”*.

Sedangkan Misi Kementerian Pertanian yang diemban pada tahun 2015-2019 adalah;

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat;
- b. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;
- c. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor produk pertanian;
- d. Mewujudkan usaha pertanian terintegrasi untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan;
- e. Meningkatkan sistem usaha tani berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya genetik;
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bio-industri;
- g. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan; dan
- h. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian;
- b. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal;
- c. Menumbuhkembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi;
- d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian; dan
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selama lima tahun ke depan, dalam membangun pertanian di Indonesia, sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor;
- d. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bio-industri dan bio-energi; dan
- e. Peningkatan kesejahteraan petani.

Guna mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan pertanian, strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019 adalah:

- a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
- b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;
- c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;
- d. Penguatan kelembagaan petani;
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian;
- f. Pengembangan dan penguatan bio-industri dan bio-energi
- g. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; dan
- h. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian 2015-2019 terdiri dari:

- a. Kebijakan peningkatan swasembada beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, cabai, dan bawang merah;

- b. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, serta bahan baku bio-industri;
- c. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantina dan ketahanan pangan;
- d. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian;
- e. Kebijakan fokus komoditas strategis;
- f. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agro industry di perdesaan; dan
- g. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Sedangkan Kebijakan Teknis Operasional Pembangunan Pertanian 2015-2019 terdiri dari:

- a. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman;
- b. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian;
- c. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian;
- d. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian; dan
- e. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019, maka arah dan kebijakan Umum Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan nasional Tahun 2015-2019 diimplementasikan dalam bentuk Sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016-2019, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (th)			
			2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588.56	639.61	695	755
		b. Produksi telur (000 ton)	3,393.36	3,536.86	3,655	3,770
		c. Produksi susu (000 ton)	850.77	910.57	980.88	1,063.56
		d. Produksi daging kambing dan domba (000 ton)	116.97	119.50	122.11	124.81
		e. Produksi daging babi (000 ton)	354.97	375.80	398.09	421.7
		f. Produksi daging unggas (000 ton)	3,206.94	3,301.58	3,449.37	3,621.00
2	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	g. Rasio volume ekspor terhadap pertanian strategis (%)	81.10	80.60	80.90	80.6
		h. Penurunan volume impor produk pertanian strategis (%)	-9.2	-18.90	-9.50	-2.9
		i. Volume ekspor ternak dan produk hewan (%)	3	5	5	5
		j. Investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2.5
		k. Investasi sub sektor peternakan PMDN (%)	1	2	2.5	3
		l. Status Kesehatan Hewan	75	77	79	80
		m. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	63.33	69.18	76.83	84.53
3	Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	n. PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp. Juta)	37.14	39.49	41.83	44.17
		o. Nilai Tukar Peternak (NTP)	107.23	107.53	107.82	108.12

2. Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021:

Sumbar Pusat Pangan Asal Hewan di Sumatera Bagian Tengah

Visi tersebut mengandung kata kunci sbb:

Pusat Pangan Asal Hewan adalah

1. Sumatera Barat sebagai produsen ternak (Sapi Potong, kerbau, Kambing dan Unggas) di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu). Ternak unggas meliputi : Ayam Kampung, Itik, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur
2. Pangan Asal Hewan adalah produk yang dihasilkan oleh ternak berupa daging, telur dan susu.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi OPD. Rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal.
2. Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing menghadapi era persaingan bebas.

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada

isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan, tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan.
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan

Sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
2. Meningkatnya produktivitas ternak
3. Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan
4. Meningkatnya status kesehatan hewan
5. Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar higiene
6. Peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	1. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	a. Peningkatan Produksi Daging	%	1.22	1.33	1.44	1.55	1.66	1.75
			b. Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	1.60	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00
		2. Meningkatnya produktivitas ternak	a. Service per conception (S/C) (jumlah pelayanan (kawin) per kebuntingan)	%	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
			b. Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi	%	15	15	20	20	25	25

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3. Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	a. Jumlah peternak yang memiliki registrasi farm di Sumatera Barat	KK	100	100	100	100	100	100
		4. Meningkatnya status kesehatan hewan	a. Tingkat kejadian kasus penyakit brucellosis dan hog cholera	Kasus	0	0	0	0	0	0
			b. Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
2.	Meningkatkan daya saing produk peternakan	Peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan dan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (Pelaku	Pelaku Usaha	9	11	13	15	17	19

B. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Sumbar Sebagai Penghasil Ternak Dan Hasil Ikutannya Utk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Asal Ternak Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Peternakan			
MISI 1 : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	Sasaran 1 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	Intensifikasi kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana Melakukan transfer bio teknologi kepada masyarakat peternak melalui petugas teknis peternakan	Kebijakan 1. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
	Sasaran 2 Meningkatnya produkifitas ternak	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan;	Kebijakan 2 Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan
	Sasaran 3 Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	Mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas strategis dan unggulan lokal yang berkelanjutan didukung penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Kebijakan 3 Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya
	Sasaran 4 Meningkatnya status kesehatan hewan	Meningkatkan kapasitas SDM Peternakan melalui pendidikan formal/bimtek/ magang/in house training dan pembinaan	Kebijakan 4 Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan
	Sasaran 5 Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak yang ASUH	Kebijakan 5 Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan
MISI 2 : Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing menghadapi era persaingan bebas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing produk peternakan	Peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan Mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar	Kebijakan 1. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan Kebijakan 2. Melakukan kontrol terhadap sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil ternak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka peraturan daerah tentang RTRW perlu dilakukan penyesuaian penataan ruang kabupaten sesuai dengan peruntukannya. Hal prinsip yang perlu disesuaikan adalah perlu penekanan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang, penerapan sanksi, proporsi kawasan lindung dalam daerah aliran sungai (DAS) dan ruang terbuka hijau masing-masing paling sedikit 30 persen, serta perlunya *zoning regulation* pada kawasan-kawasan strategis, sebagaimana juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang didalamnya telah menetapkan struktur ruang yang mengatur sistem perkotaan nasional dan penetapan Kawasan Strategis Nasional. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan tujuan penataan ruang daerahnya yaitu mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang daerah tersebut dapat dicapai dengan membuat rencana strategis kawasan atau menetapkan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan strategi merupakan kawasan yang pengembangannya diprioritaskan. Kawasan strategi tersebut meliputi kawasan strategi yang didasari oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); kawasan strategi provinsi yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemerintah provinsi; dan kawasan strategi kabupaten yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai acuan dalam penentuan kawasan strategis telah dikeluarkan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kawasan strategis kabupaten kecuali kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan negara karena merupakan kepentingan terbatas. Kawasan strategis lain yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah antara lain kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis sosial budaya; kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan. Penetapan

kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
7. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan
8. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterkaitan perencanaan ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya agropolitan peternakan sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten yang merupakan turunan dari RTRW Nasional dan Provinsi. Hal ini juga sudah diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten, dimana salah satu point prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan Peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan

Isu – isu dalam Pembangunan Sektor Peternakan

- a. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup pesat (0,86 % per tahun), dengan konsentrasi tempat tinggal penduduk sebagian besar berada di pedesaan.
- b. Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja di sektor Pertanian (80.488 orang atau 47.92% dari jumlah penduduk).
- c. Produktivitas ternak sapi potong yang rendah (dengan berat karkas $\pm$ 135 kg/ekor) dibandingkan dengan berat karkas sapi potong di daerah lain $\pm$ 180 kg/ekor (data statistik peternakan provinsi)
- d. Perbaikan mutu genetika melalui IB belum optimal

- e. Masih belum adanya industri pengolahan hasil peternakan
- f. Masih adanya ancaman penyakit hewan menular (flu burung, SE/ngorok, rabies dan jembrana) yang merupakan penyakit endemis
- g. Masih tingginya angka penjualan dan pemotongan betina produktif
- h. Puskesmas belum berbentuk UPTD akibatnya belum dapat melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat
- i. Masih ada usaha peternakan yang belum sesuai aspek lingkungan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Bupati Pesisir Selatan khususnya misi 4 yaitu **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan**, maka dirumuskanlah tujuan jangka menengah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : **Terwujudnya peningkatan produksi Peternakan**

Indikator Kinerja Tujuan dapat dilihat pada Tabel TC. 25 dibawah ini :

TABEL T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya Peningkatan Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi hasil Peternakan						
		Meningkatnya kualitas ternak	Persentase ternak unggul	3	5	5.5	6	6.5	7
		Menurunnya angka kematian ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak	1	1	0.9	0.8	0.7	0.6

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Bupati Pesisir Selatan seperti tabel 5 berikut:

Tabel 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA										
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN										
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021										
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas ternak	Persentase ternak unggul	jumlah kelahiran ternak hasil IB dibanding jumlah populasi ternak tahun yang lalu	3	5	5,5	6	6,5	7	Sumber Data : Laporan Statistik Peternakan Penanggungjawab : Disnakkeswan Kab. Pessel
2.	Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis	1. Persentase penurunan angka kematian ternak	pengurangan angka kematian ternak tahun ini dibandingkan angka kematian ternak tahun lalu	1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	Sumber data : Laporan Kegiatan Dinas Penanggungjawab : Disnakkeswan Kab. Pessel
		2. Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	data kasus zoonosis yang dilaporkan dan mendapat pelayanan di Puskesmas	44	38	32	28	22	18	Sumber data : Laporan Kegiatan Penanggungjawab : Disnakkeswan Kab. Pessel

Pada tahun 2018 sesuai dengan permendagri nomor 86 Tahun 2017 maka dilakukan revisi Perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KET
	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	
1	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Meningkatnya kualitas ternak	1.1 a. peningkatan produksi daging ternak besar b. peningkatan produksi telur ayam c. peningkatan produksi telur itik	Persentase ternak unggul	1.290.421 899,483 828,409	6	
2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis	2.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan angka kematian ternak Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	1,5 0	0,8 28	

Dari revisi yang telah dilakukan maka Rincian penetapan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagai tertuang dalam Tabel. 6

Tabel. 6. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perjanjian Kinerja Tahun 2019)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
1.	Meningkatnya kualitas ternak	Persentase ternak unggul	6	
2.	Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis	Persentase penurunan angka kematian ternak Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	0,8 28	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020 yaitu “***Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan***” serta konsep dasar Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang diarahkan pada upaya terciptanya nilai tambah dan daya saing, sehingga usaha peternakan di kabupaten Pesisir Selatan dimasa akan datang mampu bersaing dengan hasil produksi dari daerah lain yang bermuara kepada peningkatan perekonomian masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai arah pembangunan peternakan untuk masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan.
- b. Mengembangkan teknologi usaha peternakan.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia peternakan di bidang agribisnis.
- d. Meningkatkan sistem penyuluhan Peternakan yang berorientasi peningkatan kemampuan petani ternak dalam pengembangan usaha dan penerapan inovasi dan teknologi baru
- e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- f. Penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka strategi dan kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi ternak melalui program Inseminasi Buatan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peternakan melalui pelatihan, sekolah lapang, dan sosialisasi teknologi
4. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral
5. Meningkatkan sarana prasarana penunjang sektor peternakan dan kesehatan hewan
6. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna
7. Meningkatkan akses informasi terhadap masyarakat

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada taben T-C.26 dibawah ini :

TABEL T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan				
Visi	: Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
Misi	: Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.			
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Peningkatan Produksi Peternakan	1.1. Meningkatnya kualitas ternak	1.1.2. Meningkatkan ketersediaan bibit unggul	Meningkatkan pelayanan IB
				Meningkatkan Intensifikasi Kawin Alam dengan pejantan unggul
				Meningkatkan usaha penangkaran ternak unggas
			1.1.2. Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	Meningkatkan akses informasi Penerapan Teknologi Tepat Guna
				Meningkatkan SDM Peternakan
				Penyediaan sarana prasarana penerapan teknologi peternakan
		1.2. Menurunnya angka kematian ternak	1.2.1. Menurunnya kejadian penyakit ternak	Meningkatkan peran cek point
				Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang penyakit hewan
				Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
			1.2.2. Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Meningkatkan SDM tenaga Kesehatan Hewan
				Meningkatkan angka pelayanan dan kesembuhan hewan/ternak
				Meningkatkan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan (Prioritas Wilayah)

Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Sedangkan pembangunan merupakan suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanitis.

Dalam pengembangan suatu wilayah ada berbagai konsep yang digunakan, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan, megapolitan, growth pole, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi. Salah satu konsep pengembangan wilayah yang berbasis ekonomi adalah konsep pengembangan kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional wilayah kawasan yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan yakni dengan adanya pusat agropolitan dan wilayah di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan juga dicirikan sebagai kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yaitu ***Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan***. Misi ini bertujuan untuk *meningkatkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa wisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan industri*. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu strateginya adalah dengan *mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna*.

Dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah usaha peternakan dilakukan dengan strategi *mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan*. Pengembangan usaha peternakan di dalam satu kawasan, tidak saja sebagai pendekatan baru dalam pembangunan tetapi dapat dijadikan sebagai penggerak utama peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan :

1. Sub-sektor peternakan termasuk penyumbang terbesar dalam PDRB sektor pertanian (40,55%) dari PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Sub-sektor peternakan merupakan sub-sektor utama perekonomian masyarakat, baik dalam bentuk tabungan untuk biaya sekolah, pembangunan rumah, maupun sebagai sumber biaya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.
3. Permintaan pasar yang cukup besar terhadap sapi pesisir, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sapi Qurban (sekitar 8000 ekor per musim).
4. Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai sentra produksi sapi dan ayam buras.

Disamping itu, pendekatan pembangunan peternakan dewasa ini menggunakan pendekatan kawasan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dengan maksud untuk menghindari tumpang tindih antar kegiatan dan eksternalitas negatif, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan jasa penunjang. Dengan pendekatan kawasan, keterkaitan antar komoditas akan lebih mudah terjalin sehingga akan menjamin keberlanjutan kegiatan pra-produksi, proses produksi, pasca produksi dalam sistem agribisnis. Terhimpunnya sumber daya manusia yang terampil dalam suatu kawasan juga akan memudahkan dalam pembinaan dan peningkatan keterampilannya, serta dalam monitoring, pengawasan dan evaluasi.

Selama ini, pola pengembangan peternakan yang diterapkan masyarakat (peternak) tidak terfokus di lokasi potensial dan tidak terintegrasi. Lokasi pengembangan peternakan selama ini

terpencar demi azas pemerataan. Skala usahanya kecil-kecil, sehingga untuk mendapatkan dukungan berbagai komponen baik itu infrastruktur, sumberdaya manusia, kelembagaan maupun komponen penunjang lain menjadi kurang efisien. Sementara itu, pengembangan peternakan yang berbasis kawasan adalah suatu pola pengembangan yang mempunyai prinsip berada dalam satu manajemen lokasi (area), penguatan pelayanan (teknis dan pembiayaan), penguatan kelembagaan, kemandirian usaha dan daya saing, peningkatan kualitas SDM dan pendidikan, integrasi kegiatan dan kewenangan, pendampingan stakeholder serta diversifikasi produk.

Pendekatan kawasan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan produksi komoditas unggulan. Dalam suatu kawasan peternakan akan terdapat sarana-prasarana pelayanan teknis budidaya, sarana-prasarana pelayanan pembiayaan, sarana-prasarana pelayanan pendidikan/pelatihan, sarana-prasarana pelayanan pemasaran, sarana-prasarana pelayanan kesehatan ternak, dan sarana-prasarana pengolahan hasil ternak. Dengan demikian diharapkan hasil yang lebih baik dalam usaha peternakan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan, disusun strategi program dan strategi kegiatan melalui pengembangan kawasan Sentra Peternakan Rakyat. Pengwilayahan komoditi ini disesuaikan dengan topografi Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke Selatan. Adapun kawasan pengembangan tersebut lokasinya disesuaikan dengan potensi wilayah masing – masing dilihat dari tujuh indikator utama yaitu :

- a. Basis biomassa pakan
- b. Jumlah populasi
- c. Sosial budaya (culture)
- d. Kelembagaan dan jumlah rumah tangga peternak
- e. Regulasi
- f. Konektifitas produsen dan konsumen
- g. Harus sesuai dengan kebijakan daerah

Masing-masing kawasan pengembangan memuat strategi program dan kegiatan yang di danai dari berbagai sumber.

A. Program dan Kegiatan pada Kawasan Pengembangan (KP)

No	Sektor Andalan	Strategi Program	Strategi Kegiatan
I	Kawasan Peternakan		
	a. Kawasan pengembangan sapi potong	Peningkatan populasi sapi potong	Ketersediaan bibit unggul sapi potong
	b. Kawasan pengembangan ternak unggas	Pengembangan pendukung ekonomi rakyat	Ketersediaan bibit unggul ternak unggas
	c. Kawasan agropolitan	Pengembangan ternak di kawasan agropolitan	Ketersediaan bibit unggul sapi potong dan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
	d. Kawasan integrasi sawit – ternak	Pemanfaatan kebun sawit rakyat secara optimal	Pendistribusian sapi potong pada kebun sawit rakyat

B. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Dengan adanya perubahan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan revisi terhadap judul kegiatan, serta penempatan kegiatan pada program yang sesuai.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pokok :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12. Penunjang operasional perencanaan dan Pelaporan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pokok :

1. Pengadaan Meubeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pokok :

1. Pendidikan dan Pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Pokok :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
3. Penyusunan laporan tahunan dan statistik

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pokok :

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak

2. Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik
3. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar daerah.
4. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Rabies
5. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Pembibitan dan Perawatan Ternak
2. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
3. Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB
4. Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan
5. Budidaya Itik Bayang
6. Budi daya ayam local
7. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan
8. Pengembangan Ternak untuk Menunjang Percepatan Pembangunan
9. Fasiltasi pengembangan modal usaha peternakan

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak

Kegiatan Pokok :

1. Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan daerah

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Penerapan Teknologi Peternakan

9. Program Peningkatan Agribisnis Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan.

Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program	Sasaran Kegiatan
1.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 3. Terpantaunya lalu lintas ternak keluar dan masuk daerah 4. Penambahan poskeswan/klinik hewan
2.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Tersedianya bibit ternak lokal dan unggul 2. Tersedianya vaksin dan pakan ternak kepada petugas medis dan paramedis 3. Meningkatnya populasi ternak melalui IB (Inseminasi Buatan) 4. Peningkatan kelembagaan dan usaha peternakan 5. Peningkatan Sarana tempat pemotongan hewan 6. Fasiltasi permodalan dalam pengembangan usaha peternakan 7. Peningkatan populasi ternak melalui bantuan ternak bagi masyarakat
3.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1. Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 2. Penumbuhan sarana pasar ternak

4	Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	1. Terlaksananya pembangunan dan rehab sarana prasarana peternakan 2. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung usaha peternakan di kelompok tani ternak
---	---	--

B. Program Nasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program	Sasaran Kegiatan
1.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Meningkatkan produksi pangann asal ternak 2. Meningkatkan daya saing peternakan 3. Meningkatkan kesejahteraan peternak

5.2. Pendanaan Indikatif

Untuk pendanaan indikatif rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Matrik Pendanaan sebagai berikut .

Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari tabel T-C.27 sebagai berikut :

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Terwujudnya peningkatan produksi peternakan	Meningkatnya kualitas ternak	22		Persentase Peningkatan Produksi hasil Peternakan																	
					- Persentase ternak unggul		3	1,427,343	5.0	1,671,981	5.5	1,830,129	6	3,243,857	6.5	2,309,371	7	2,729,338	7	3,536,487	Disnakkeswan	15 kec.
				Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan		3	1,427,343	5.0	1,671,981	5.5	1,830,129	6	3,243,857	6.5	2,309,371	7	2,729,338	7	3,536,487	Disnakkeswan	15 kec.
			10	Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB	Peningkatan populasi ternak unggul	2500 ekor	2,500	365,343	2,500	408,000	2,575	442,000	2,600	477,430	2,653	516,000	2,700	516,000	2,700	516,000	Disnakkeswan	15 kec.
			6	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Pengendalian penyakit ternak	11.000 ekor	10,500	300,000	11,000	315,000	11,000	330,750	11,000	347,287	11,000	364,651	11,000	392,684	11,000	325,000	Disnakkeswan	15 kec.
			2	Pembibitan dan perawatan ternak	Operasional pemeliharaan ternak sapi di P4 Lengayang	12 bulan	12 bulan	200,000	12 bulan	240,000	12 bulan	288,000	12 bulan	315,600	12 bulan	414,720	12 bulan	497,654	12 bulan	497,654	Disnakkeswan	Lengayang
			12	Pemberdayaan kelembagaan dan usaha peternakan	Jumlah peternak yang mendapat pelatihan	230 orang	120	200,000	90	220,000	100	240,000	110	260,000	120	260,000	120	280,000	120	280,000	Disnakkeswan	15 kec.
			22	Pengembangan ternak untuk menunjang percepatan pembangunan	Jumlah kelompok tani ternak yang mendapat bantuan ternak	4	4	250,000	5	275,000	6	300,000	7	325,000	8	350,000	9	375,000	9	375,000	Disnakkeswan	15 kec.
			16	Pengembangan itik Bayang	Peningkatan jumlah penangkar itik bayang	3 kelompok tani ternak	4	56,000	5	60,000	7	62,000	9	64,000	11	66,000	12	68,000	13	68,000	Disnakkeswan	15 kec.
			20	Budidaya ayam lokal	Peningkatan jumlah penangkar ayam lokal	3 kelompok tani ternak	3	-	3	93,981	3	103,379	3	113,000	3	116,000	3	119,000	18	119,000	Disnakkeswan	15 kec.
				Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Peternakan	Jumlah peternak yang mendapat fasilitasi akses kredit usaha		-		30	-	50	-	40	148,707	35	150,000	30	155,000	185	155,000	Disnakkeswan	
					Jumlah peternak yang mendapat fasilitas AUTS/K		-		300	-	500	-	800		900		1,000		1,000			

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

					Pendistribusian Bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	1234	1,124,833	-	-	200	250,000	1,234	1,124,833	Disnakkheswan		
					Peningkatan Agribisnis Peternakan																		
				1	Percepatan Swasembada daging sapi dan kerbau	Jumlah kelompok ternak yang dibina	4	4	56,000	4	60,000	5	64,000	6	68,000	7	72,000	8	76,000	8	76,000	Disnakkheswan	15 kec.
					Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan																		
					Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah even promosi yang diikuti	20	3	188,000	4	246,672	3	977,330	3	267,354	4	275,000	3	250,000	20	250,000		
				Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis		Persentase penurunan angka kematian ternak	1	1		1		0.9		0.8		0.7		0.6		0.6			
					Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																		
			6		Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Tersedianya vaksin SE Tersedianya vaksin rabies	5.500 dosis 5.500 dosis	10,500	300,000	11,000	315,000	11,000	330,750	11,000	347,287	11,000	364,651	11,000	392,684	11,000	325,000	Disnakkheswan	15 kec.
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																		
				2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya operasional vaksinasi	11.000 dosis	11.000 dosis	213,556	11.000 dosis	300,000	11.000 dosis	300,000	11.000 dosis	310,000	11.000 dosis	310,000	11.000 dosis	320,000	11.000 dosis	320,000	Disnakkheswan	15 kec.
				3	Pengawasan lalu lintas ternak antar daerah	Terlaksananya pengawasan terhadap hewan, bahan asal hewan dan produk asal hewan	2 cek poin 70 sampel	2 cek poin 70 sampel	120,627	2 cek poin 70 sampel	150,000	2 cek poin 70 sampel	150,000	2 cek poin 70 sampel	160,000	2 cek poin 70 sampel	160,000	2 cek poin 70 sampel	165,000	2 cek poin 70 sampel	165,000	Disnakkheswan	15 kec.
				4	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	3300 ekor	3200 ekor	217.290	2800 ekor	275,000	5500 ekor	285,000	5500 ekor	290,000	5500 ekor	295,000	5500 ekor	295,000	5500 ekor	295,000	Disnakkheswan	15 kec.
				5	Penyusunan Ranperda Rabies	Tersedianya dokumen payung hukum penanganan rabies	1 dokumen	0	0.000	0	26,742	1	35,356	1	35,356	0	-	0	-	1 dokumen	97,454	Painan	
				6	Pengawasan Peredaran obat hewan	jumlah poultry shop yang diawasi	-	-	-	-	-	-	-	10	47,709	12	-	15	-	15 poultry shop	47,709		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 memuat indikator kinerja yang harus dicapai setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai OPD pelaksana urusan pilihan bidang pertanian sub sector peternakan diberikan target indikator kinerja utama sebagaimana berikut;

Tabel 7 (T-C.28). Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas ternak								
	Persentase ternak unggul	2,5	3	5	5,5	6	6,5	7	7
2	Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis								
	Persentase penurunan angka kematian ternak	1	1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan								

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, merupakan pedoman bagi jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengimplementasikan tahapan pembangunan peternakan secara berkelanjutan.

Penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada RPJMD, yang disinergikan dengan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, serta berdasarkan analisis teknis dan empiris potensi peternakan, potensi kawasan dan kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021 dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis data lapangan secara komprehensif dan mendalam serta ditunjang dengan berbagai sumber kepustakaan yang kredibel. Harapannya adalah, Renstra tidak saja sebagai dokumen perencanaan, namun secara praktis dapat langsung diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik tingkat kabupaten maupun petugas lapangan. Selain itu, Renstra ini semoga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan alokasi pembiayaan pembangunan peternakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Renstra ini memberikan faedah bagi semua pihak. **Aamiin.**

Painan, Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Rusdianto, S.N., M.Nur
NIP. 19601112 199203 1 008